



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020 sebagai implementasi dari pertanggungjawaban keuangan daerah, yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020 disusun dengan menggunakan basis akrual yang diharapkan dapat memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Laporan Keuangan Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku sesuai



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil – hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
4. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan per 30 November 2020 dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020
5. Menyediakan dan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Laporan Operasional per 30 November 2020, Neraca per 30 November 2020, Laporan Perubahan Ekuitas per 30 November 2020, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum dari penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Keepmat atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, serta sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan

Memuat informasi tentang Ekonomi Makro (Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Perekonomian Daerah, Pendapatan Perkapita, Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia) Kebijakan keuangan dan Target APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta Hambatan dan kendala yang ada dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan, yang meliputi : Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Beban, dan komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas.

BabVI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VIII Penutup



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Menurut BPS Kulon Progo (2016) bahwa Data Pendapatan Nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Hal tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan analisis ekonomi suatu wilayah yang meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan perananan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 2 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2018 mencapai 10,31 trilyun sedangkan pada tahun 2017 mencapai 9,06 trilyun rupiah. Nilai PDRB yang



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2018 (dalam Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.725,34	1.817,77
B	Pertambangan dan Penggalian	131,69	169,28
C	Industri Pengolahan	1.124,65	1.240,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,34	9,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,96	12,78
F	Konstruksi	824,93	1.376,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.263,36	1.388,86
H	Transportasi dan Pergudangan	709,04	773,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	349,97	378,61
J	Informasi dan Komunikasi	451,34	489,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	287,56	317,06
L	Real Estate	305,76	330,86
M,N	Jasa Perusahaan	25,11	27,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	844,50	908,52
P	Jasa Pendidikan	530,26	573,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	133,32	142,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	332,38	358,28
	PDRB ADHB	9.060,46	10.318,26

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2019

Keterangan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), pada tahun 2018 mencapai sebesar 7,72 trilyun rupiah, pada tahun 2017 sebesar 6,97 trilyun rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2018 (dalam Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.178,30	1.196,63
B	Pertambangan dan Penggalian	106,25	134,55
C	Industri Pengolahan	892,97	963,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,39	7,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,12	9,66
F	Konstruksi	632,72	1.010,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	977,55	1.045,97
H	Transportasi dan Pergudangan	564,61	603,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	256,64	274,68
J	Informasi dan Komunikasi	456,08	489,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	200,12	213,00
L	Real Estate	254,09	268,08
M,N	Jasa Perusahaan	22,68	24,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	571,32	596,14
P	Jasa Pendidikan	449,16	473,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,62	115,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	284,76	301,79
	PDRB ADHK	6.973,41	7.729,57

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2019

Keterangan: *) angka sementara

**) angka sangat sementara



2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2017 menurut BPS Kabupaten Kulon Progo adalah 5,97%. Pada tahun 2018 naik menjadi 10,84%. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2017 terjadi percepatan pada beberapa sektor yang cukup berarti yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, dan sektor jasa keuangan dan asuransi.

Untuk sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 13,83% menjadi sebesar 26,64% pada tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh pematangan lahan/pengurangan lahan bandara dan pengurangan lahan untuk relokasi perumahan warga terdampak bandara yang banyak mengambil tanah urug dari wilayah Kecamatan Kokap. Untuk sektor konstruksi laju pertumbuhan dari tahun 2017 sebesar 12,25% menjadi sebesar 59,73% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 tahap fisik pembangunan bandara YIA sedang berlangsung. Sedangkan untuk jasa keuangan dan asuransi mengalami laju pertumbuhan dari tahun 2017 sebesar 1,08% menjadi 6,44% pada tahun 2018. Hal ini sebagai akibat dari pembebasan lahan bandara/pembayaran ganti rugi tanah yang telah diterima oleh warga terdampak bandara.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 mencapai 10,84%, pertumbuhan ekonomi ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di DIY sepanjang sejarah dengan laju pertumbuhan paling besar berada sektor konstruksi sebesar 59,73%. Hal ini seiring dengan berbagai jenis kegiatan yang masih berjalan di Kabupaten Kulon Progo, yang berpengaruh paling besar adalah pembangunan bandara Yogyakarta International Airport, meskipun masih banyak pembangunan di Kulon Progo lainnya seperti pembangunan jalan jalur lintas selatan (underpass), pembangunan Jogja Agro Tekno Park di Kecamatan Nanggulan, pembangunan jalan Bedah Menoreh, pembangunan pengendalian banjir wilayah selatan, pembangunan SPAM IKK Kalibawang-Samigaluh, pembangunan jalan ruas Sentolo-Klangon, serta pembangunan kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2018 (persen)

Kategori	Uraian	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,94	1,56
B	Pertambangan dan Penggalian	13,83	26,64
C	Industri Pengolahan	7,68	7,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,73	3,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,65	5,84
F	Konstruksi	12,25	59,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,06	7,00
H	Transportasi dan Pergudangan	3,60	6,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	7,03
J	Informasi dan Komunikasi	5,86	7,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	6,44
L	Real Estate	6,38	5,51
M,N	Jasa Perusahaan	5,21	5,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,79	4,35
P	Jasa Pendidikan	7,16	5,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,68	5,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,41	5,98
	PDRB	5,97	10,84

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2019

Keterangan: *) angka sementara

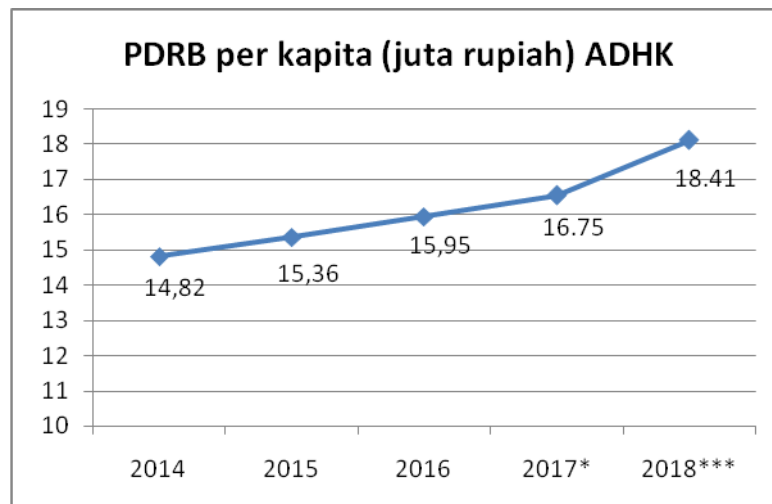
***) angka sangat sementara



2.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2014-2019, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar Rp14,82 juta dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 mencapai Rp15,36 juta, tahun 2016 sebesar Rp.15,95 juta, tahun 2017 sebesar 16,75 juta dan pada tahun 2018 mencapai Rp.18,41 juta.



Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2019

Keterangan: *) angka sementara

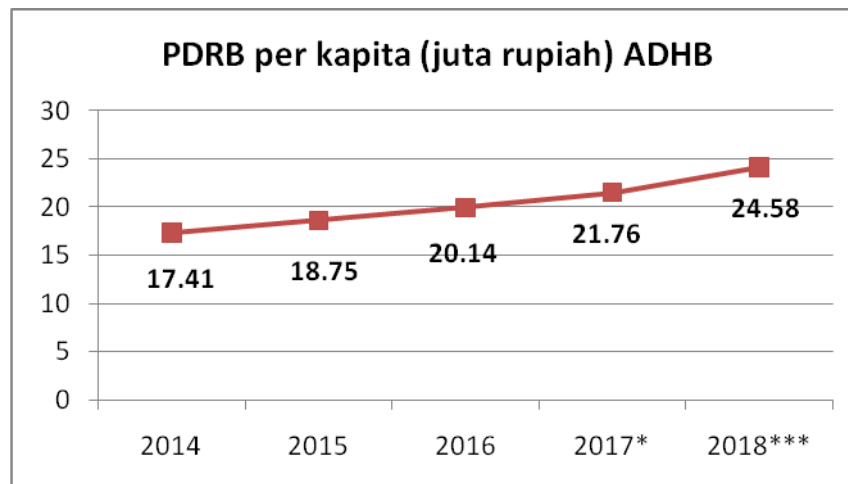
***) angka sangat sementara

Gambar 2.1

**PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014 – 2018 (juta rupiah)**



Sedangkan nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp17,41 juta dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 mencapai Rp21,76 juta, dan pada tahun 2018 mencapai Rp24,58 juta.



Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2019

Keterangan: *) angka sementara

***) angka sangat sementara

Gambar 2.2

**PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014 – 2018 (juta rupiah)**

2.1.4 Inflasi

Secara umum, inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Perhitungan inflasi di Kabupaten Kulon Progo masih menggunakan acuan nilai dari Kota Yogyakarta dikarenakan BPS belum menetapkan Kota Wates sebagai salah satu lokasi dalam mengidentifikasi inflasi. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS DIY No 01/01/34/Th. XXI tentang Perkembangan Indeks



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Harga Konsumen/Inflasi yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2019, nilai inflasi (yoy) secara umum adalah sebesar 2,66%. Besaran nilai inflasi ini cenderung turun bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,20 %. Secara umum, pada kurun waktu 2014-2018 nilai inflasi secara umum mengalami fluktuasi sebagaimana tercantum pada Tabel 2.26 meskipun secara nasional, nilai inflasi di Kota Yogyakarta masih dibawah nilai inflasi nasional pada kurun waktu 5 tahun tersebut.

Tabel 2.4

Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2014-2018

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bahan Makanan	%	7,70	4,64	4,77	2,71	3,15
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok	%	2,95	5,04	3,84	2,79	2,63
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	%	8,92	4,41	1,64	5,63	2,43
4	Sandang	%	3,61	5,87	3,04	3,84	3,61
5	Kesehatan	%	5,49	4,21	4,17	2,76	1,19
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	%	2,37	1,36	2,40	2,81	3,34
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	%	9,36	2,51	-2,06	6,72	2,46
Inflasi Kota Yogyakarta		%	6,59	3,09	2,29	4,20	2,66
Inflasi Nasional		%	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber data : BPS DIY, 2019

Bila dicermati menurut kelompok pengeluaran, nilai inflasi terbesar (yoy) adalah sandang (3,61%), pendidikan, rekreasi dan olah raga (3,34%) dan bahan makanan (3,15%) sedangkan nilai terendah adalah kesehatan sebesar 1,19. Inflasi pada Bulan Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,57% dibandingkan nilai pada Bulan November 2018 disebabkan oleh naiknya harga yang ditunjukkan kenaikan indeks kelompok pengeluaran yaitu bahan makanan sebesar 1,28%, transportasi dan komunikasi 0,87%, perumahan 0,38%, sandang



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

0,25%, makanan jadi 0,27%, kesehatan 0,22%, dan pendidikan sebesar 0,10%. Berdasarkan kecenderungan nilai inflasi dan aspek sosial budaya, pengendalian laju inflasi diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat khususnya pada waktu terjadinya lonjakan permintaan kelompok pengeluaran dengan melakukan pengaturan, substitusi maupun upaya pengendalian lainnya khususnya saat pergantian tahun, liburan, hari raya maupun awal masuk sekolah.

2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan garis kemiskinan tahun 2014 sebesar Rp265.575,-, artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp265.575,-, selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin. Selanjutnya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2018 di Kabupaten Kulon Progo menjadi Rp323.105,-, artinya setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp323.105,-, selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo, namun secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo masih menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan dengan tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 2.5

Penduduk Miskin di D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota	Penduduk Miskin									
	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribu)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018*	2014	2015	2016	2017	2018
Kulon Progo	84,67	88,13	84,34	84,17	77,72	20,64	21,40	20,30	20,03	18,30
Bantul	153,49	160,15	142,76	139,67	134,84	15,89	16,33	14,55	14,07	13,43
Gunungkidul	148,39	155,00	139,15	135,74	125,76	20,83	21,73	19,34	18,65	17,12
Sleman	110,44	110,96	96,63	96,75	92,04	9,50	9,46	8,21	8,13	7,65
Kota Yogyakarta	35,60	35,98	32,06	32,20	29,74	8,67	8,75	7,70	7,64	6,98
D.I.Yogyakarta	532,59	550,23	494,94	488,53	460,10	14,55	14,91	13,34	13,02	12,13

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2019

Tabel 2.6

Garis Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kulon Progo	265.575	273.436	297.353	312.403	323.105
Bantul	301.986	312.514	332.057	347.476	369.480
Gunungkidul	243.847	250.630	264.637	277.261	288.748
Sleman	306.961	318.312	334.406	351.331	370.127
Kota Yogyakarta	366.520	383.966	401.193	423.815	467.061
D.I.Yogyakarta	313.452	335.886	354.084	374.009	409.744

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 2.7

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2018**

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Kulon Progo	3,22	4,16	3,55	2,79	2,47	0,69	1,24	1,00	0,64	0,56
Bantul	2,44	3,16	2,02	2,21	2,17	0,59	0,89	0,41	0,56	0,46
Gunungkidul	3,74	4,55	4,16	3,36	3,84	1,03	1,33	1,30	0,79	1,16
Sleman	1,15	1,46	1,36	1,23	0,98	0,22	0,37	0,34	0,28	0,20
Kota Yogyakarta	1,14	1,06	1,05	1,58	0,98	0,26	0,23	0,19	0,48	0,34
D.I.Yogyakarta	2,19	2,93	2,30	2,19	1,38	0,48	0,83	0,59	0,55	0,50

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2019

Tabel 2.8

**Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Kulon Progo Tahun
2014-2018**

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
		Jumlah (000)	%		
2014	265.575	84.67	20,64	3,22	0,69
2015	273.436	88.13	21,40	4,16	1,24
2016	297.353	84.34	20,30	3,55	1,00
2017	312.403	84.17	20,03	2,79	0,64
2018	323.105	77,72	18,30	2,47	0,56

Sumber data : Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2019

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2018 selalu berada di atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Dalam jangka panjang kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih di Kabupaten Kulon Progo dengan masuknya beberapa mega proyek seperti



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

pembangunan bandara YIA, pembangunan kawasan penyangga KSPN Borobudur, pembangunan rel kereta api bandar udara YIA ke Stasiun Kedundang dan pembangunan jalan Bedah Menoreh.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill (ketrampilan) dan pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja. Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin, meskipun pernah meningkat pada tahun 2015. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.1.6 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada periode Agustus 2014 – Agustus 2018, TPT Kabupaten Kulon Progo selalu di bawah rata-rata TPT Provinsi D.I Yogyakarta maupun nasional. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPT Kabupaten Kulon Progo jauh dibawah TPT nasional, bahkan hampir separuh dari TPT nasional.

Tabel 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo dan
D.I.Yogyakarta Tahun 2017-2018

Kabupaten/Kota	2017	2018
Kulon Progo	1,99	1,49
Bantul	3,12	2,72
Gunung Kidul	1,65	2,07



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kabupaten/Kota	2017	2018
Sleman	3,51	4,40
Yogyakarta	5,08	6,22
DIY	3,02	3,35

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018

2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

2.2.1 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2019 diperkirakan mengalami peningkatan yang sangat tajam mencapai 8,60 trilyun rupiah, pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 9,26 trilyun rupiah. PDRB atas dasar harga konstan (harga tahun 2010) selama kurun waktu 2014 – 2020 dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.10

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2020 (dalam Trilyun Rupiah)**

No	Tahun	PDRB ADHK
1	2014	6.00
2	2015	6.28
3	2016	6.58
4	2017	6.97
5	2018	7.72
6	2019	8,60
7	2020	9,26

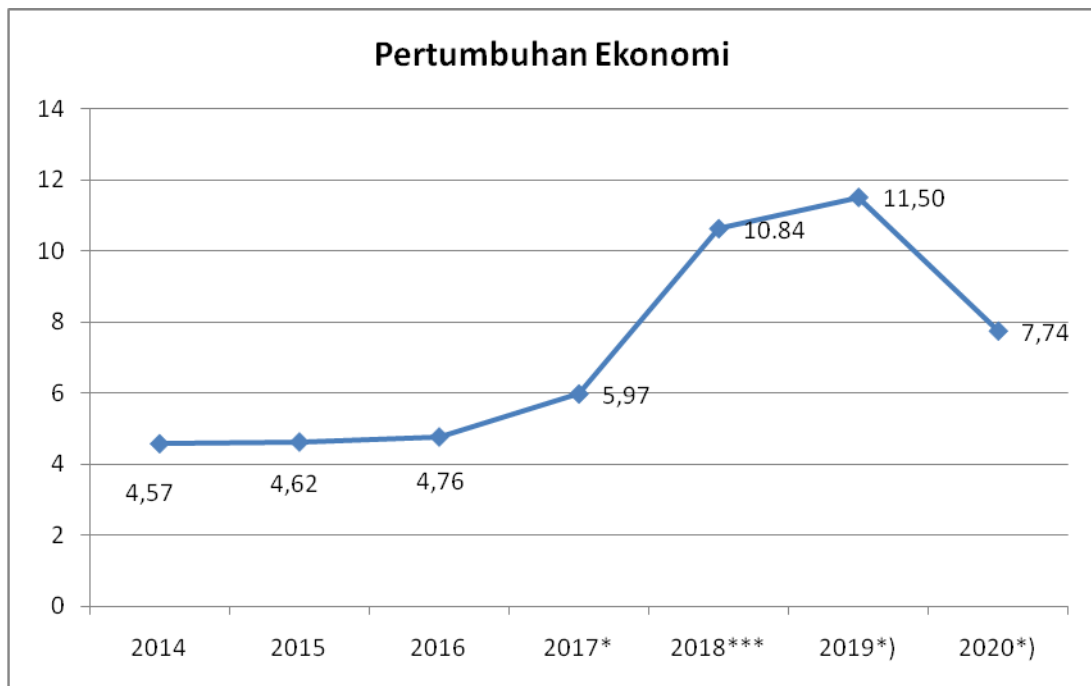
Sumber : BPS DIY, 2019; Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019 (diolah)



2.2.2 Laju Petumbuhan Ekonomi (LPE)

Berdasarkan analisis, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010, pada periode 2014 hingga 2018 selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya demikian pula pada tahun 2019 masih mengalami kenaikan dan baru tahun 2020 mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo adalah 4,57% (2014), 4,62% (2015), 4,76%(2016), 5,97% (2017), 10,84% (2018), 11,50% (2019) dan 7,74% (2020). Meskipun secara nominal, nilai PDRB ADHK pada tahun 2014 mencapai 6.00 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebesar 9,27 triliun namun bila dicermati nilai LPE, tahun 2019 merupakan puncak pertumbuhan ekonomi sedangkan mulai 2020 mulai terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini terjadi seiring dengan adanya target penyelesaian infrastruktur pokok dari Bandara *Yogyakarta International Airport* yang merupakan bagian terbesar dari PSN bandara baru. Pada bulan Mei tahun 2019 telah dapat dioperasikannya bandara dengan perlengkapan minimal. Selain infrastruktur dasar bandara, berbagai fasilitas pendukung seperti akses jalan, pembangunan permukiman bagi warga terdampak juga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi pada periode puncak di tahun 2019 khususnya dari sektor konstruksi. Namun demikian, nilai proyeksi ini juga masih menunggu kinerja sektor pertambangan dimana PT Jogja Magasa Iron yang telah habis masa penanguhan operasinya pada April 2018, pada tahun 2019 akan memulai melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik konsentrat dan pemurnian besi baja di Kulon Progo. Pada kurun 2 tahun, akan dilakukan pembangunan pabrik dan diharapkan mulai beroperasi pada akhir 2021. Bila rencana PT JMI ini terealisasi, tentu akan berkontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan daerah disamping beberapa agenda pembangunan lain Proyek Strategis Nasional Akses Kereta Api ke Bandara, Rencana Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) SPAM Kamijoro serta Pembangunan Jalan Bedah Menoreh serta investasi lainnya.



Sumber : BPS DIY, 2018; Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019 (diolah)

* angka sementara

*** angka sangat sementara

*) angka sementara proyeksi Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 2.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 – 2020

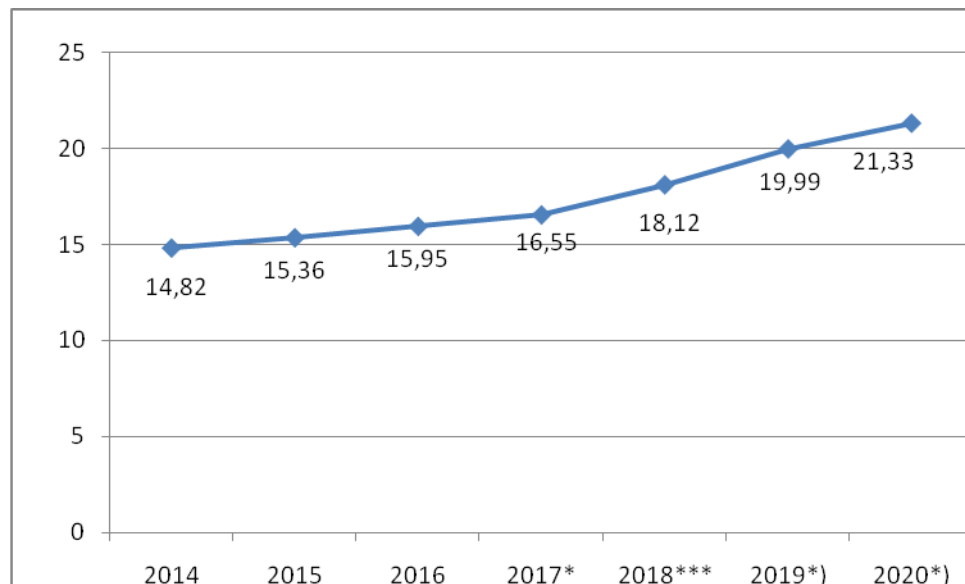
2.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian disuatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Selama kurun waktu 2014-2020, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 14,82 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 21,33 juta rupiah. Peningkatan PDRB per kapita yang cukup tinggi ini merupakan peningkatan PDRB per kapita secara riil PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010 sehingga sudah tidak dipengaruhi inflasi.



Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2019; Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019 (diolah)

* angka sementara

* angka sangat sementara

*)angka sementara proyeksi Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 2.4
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014 – 2020 (juta rupiah)



2.2.4 Proyeksi Inflasi

Proyeksi inflasi yang mendasar pada inflasi Kota Yogyakarta tahun 2013-2017 mempunyai kecenderungan menurun. Inflasi di tahun 2019 diperkirakan sebesar 2,14%, dan tahun 2020 sebesar 1,59%. Proyeksi inflasi tahun 2019-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11

Proyeksi Inflasi Tahun 2019-2020

Tahun	Inflasi (%)
2019	2,14
2020	1,59

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2019

2.2.5 Proyeksi Kemiskinan

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka penurunan angka kemiskinan diantaranya adalah menggandeng pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terwadahi dalam Forum CSR, melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan melakukan bedah rumah dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni. Disisi lain program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk mengatasi kemiskinan adalah Bela Beli Kulon Progo, bedah rumah, jambanisasi, beasiswa siswa miskin, sambungan listrik rumah tangga dan penyediaan sarana air bersih. Dan pada tahun 2020 dilakukan bantuan pangan non tunai lokal dengan mengadopsi program pusat dengan menambah sasaran penerima dan menambah komoditas bantuan.

Proyeksi angka kemiskinan pada tahun 2019 adalah 17,57% dan pada tahun 2020 adalah 16,67%. Melalui program yang terpadu tersebut diharapkan dari tahun ke tahun akan terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo. Adapun target angka kemiskinan sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo di tahun 2019 sebesar 16,25% dan pada tahun 2020 sebesar 13,75%.



Tabel 2.12

Proyeksi Kemiskinan Tahun 2019-2020

Tahun	Kemiskinan (%)
2019	17,57
2020	16,67

Sumber : Dinas KominfoKab. Kulon Progo, 2019

2.2.6 Proyeksi Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dalam penawaran tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat yang dapat dilihat dari besarnya proporsi penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian baik yang berstatus bekerja, mencari kerja atau penganggur. Proyeksi tingkat pengangguran terbuka sesuai RPJMD adalah pada tahun 2019 adalah 1,80% dan pada tahun 2020 adalah 1,70%.

Tabel 2.13

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2020

Tahun	TPT(%)
2019	1,80
2020	1,70

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2019



2.1 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya, dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan perencanaan diawali dari hasil musrenbang yang dikualifikasi berdasarkan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, hasilnya akan di muat dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk dipedomani dalam penyusunan KUA PPAS yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam bentuk nota kesepakatan. SKPD wajib menyusun rencana kerja anggaran (RKA) berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam permendagri dan melakukan rekonsiliasi dan asistensi RKA bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), dan kemudian menghasilkan draf RAPBD yang akan di evaluasi oleh Gubernur/Mendagri sebelum disahkannya APBD.
2. Pelaksanaan Anggaran diawali dengan merancang DPA SKPD (dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah) untuk dilakukan verifikasi dan kemudian menjadi DPA sebagai acuan dasar bagi SKPD dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintahan dalam setahun berjalan. Selanjutnya SKPD wajib membuat laporan realisasi semester pertama untuk menjadi acuan dalam merancang APBD perubahan
3. Penatausahaan dilakukan pada struktur APBD yaitu Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, pengelolaan kekayaan dan kewajiban daerah. Pada penatausahaan pendapatan, bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke Bendahara Umum Daerah selambat-



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

lambatnya satu (1) hari kerja. Penatausahaan belanja adalah menerbitkan SPM-UP (surat perintah membayar uang persediaan, SPM-TU (surat perintah pembayaran tambah uang), SPM-GU (surat perintah pembayaran ganti uang), SPM-LS (surat perintah membayar langsung) oleh kepala SKPD. penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh PPKD (Pejabat pengelola keuangan daerah) selaku bendahara umum daerah. Penatausahaan pembiayaan dilakukan oleh PPKD, dan Penatausahaan Pengelolaan kekayaan daerah berkaitan dengan kas umum, piutang, investasi, barang, dana cadangan, dan utang. penatausahaan dikerjakan berdasarkan akuntansi keuangan daerah

4. Pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual yang terdiri dari 5 komponen yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dijadikan acuan dalam menyusun Ranperda pertanggungjawaban APBD.
5. Pemeriksaan; Laporan Keuangan daerah akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan opini tentang tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Selanjutnya ringkasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 2.11

Ringkasan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

	Anggaran (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0,00
Dana Perimbangan		0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00
Jumlah Pendapatan		0,00
BELANJA		
Belanja Tidak Langsung		3.298.435.809,03
Belanja Langsung		2.541.973.294,00
Jumlah Belanja		
Surplus / (Defisit)		0,00
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan		0,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00
Pembiayaan Netto		0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berkenaan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja kegiatan, sebanyak 22 kegiatan dapat dicapai dengan baik dalam rangka mendukung program terkait.

No.	URAIAN	Masukan dalam rupiah	Indikator	
			Hasil	Keluaran
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1. Penyediaan jasa dan Peralatan Perkantoran	196.415.780	Dukungan sebesar 5% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka 12 bulan
	2. Penyedia Jasa Administrasi	24.485.100	Dukungan sebesar 5%	Honorarium petugas



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

	Keuangan		terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	penatausahaan keuangan dan barang
	3. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi	36.237.500	Dukungan sebesar 10% terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	Makanan dan minuman untuk rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan. Tersedianya sewa tempat, makan minum untuk rapat maupun jamuan tamu serta biaya koordinasi dan konsultasi (DAK) 80 orang.
II.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja			
	1. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	11.715.750	Dukungan sebesar 6,6% terhadap capaian	Rencana kerja tahun 2020, perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

			perencanaan, pengendalian dan evaluasi kerja	Rencana kerja tahun 2020, Review Renstra tahun 2017-2022 sebanyak 3 dok.
	2. Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	31.505.875	Dukungan sebesar 6,6% terhadap capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.	Laporan keuangan bulanan, smesteran, tahunan 14 dok. Laporan keuangan bulanan (DAK) 13 dok
	3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja	25.448.750	Dukungan sebesar 6,6% terhadap capaian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja	Laporan bulanan, triwulanan, laporan tahunan, LKJIP, profil kinerja, SPIP 21 dok Laporan triwulanan, tahunan (DAK) 5 dok.
III.	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD			
	1. Pengadaan sarana dan prasarana	4.200.000	Dukungan sebesar 5%	Sarana dan prasarana



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

	perkantoran		terhadap capaian sarana dan prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	kerja 16 unit.
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	245.513.500	Dukungan sebesar 12% terhadap capaian pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja (unit) 50 unit dan terpenuhinya bahan bakar minyak dalam kegiatan kedinasan (DAK) 12 bulan.
	3. Pendidikan dan pelatihan non formal	34.050.000	Dukungan sebesar 3% terhadap capaian sarana dan prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal 6 orang. Terlatihnya Bimtek non



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

			OPD	formal bagi aparatur (DAK) 51 orang
III.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
	1. Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk	748.191.532	Dukungan sebesar 63,96% terhadap cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan.	Terekamnya KTP el penduduk 6.000 orang, terbitnya Kartu Keluarga 25.500 set, terbitnya KTP 17.000 set, terbitnya Kartu Keluarga (DAK) 10.000 set, terbitnya KTP el (DAK) 16.000 keping, terbitnya KIA (DAK) 15.000 keping, terekamnya KTP el penduduk 1.000 orang.
	2. Pencatatan dan penerbitan	53.394.340	Dukungan sebesar	Terbitnya Surat



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

	dokumen pindah datang penduduk		10,99% terhadap cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Keterangan Pindah 1.016 dok, Surat Keterangan Pindah 1.000 dok, terpenuhinya Surat keterangan Datang (DAK) 1.000 dok, terpenuhinya Surat Keterangan Pindah (DAK) 1.000 dok.
	3. Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan	65.898.200	Dukungan sebesar 23,68% terhadap cakupan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	Tersusunnya laporan perkembangan penduduk semester I, II dan tahunan 3 dok. Tersusunnya profil kependudukan 1 dok.
	4. Pendataan Kependudukan	23.609.400	Dukungan sebesar 8,05% terhadap	Tersusunnya laporan pendataan penduduk 3



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

			cakupan Pelayanan Adminsitration Kependudukan	laporan. Terselenggaranya FGD Pendataan (DAK) sebanyak 1 paket.
IV.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil			
	1. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	208.275.340	Dukungan sebesar 47,41% terhadap cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran 4.000 dok, terlaksananya penrbitan Akta Kelahiran (DAK) 1.000 dok.
	2. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	116.442.340	Dukungan sebesar 25,65% terhadap cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya penerbitan akta perceraian 1 dok, terlaksananya penerbitan akte perkawinan 70 dok,



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

				terlaksana penerbitan akte perceraian (DAK) 1 dok, terlaksananya penerbitan akta perkawinan (DAK) 70 dok.
	3. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Kewarganegaraan	131.417.740	Dukungan sebesar 22,74% terhadap cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian 5.000 dok, terlaksana penerbitan dokumen perubahan status anak 2 dok, terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) 1.000 dok.
V.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

	1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK	196.529.900	Dukungan sebesar 34,86% terhadap cakupan Pengelolaan Informasi Administisasi Kependudukan	Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan KTP el 14 unit dan terpeliharanya perangkat SIAK dan Jaringan Tower (DAK) 2 paket.
	2. Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	158.104.400	Dukungan sebesar 22,06% terhadap cakupan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jilid dokumen (DAK). Re entry dokumen (DAK). Scan dokumen (DAK) 2.600 buku. Jilid dokumen 500 buku. Scan dokumen 660 buku.
	3. Pengelolaan databasr	39.124.467	Dukungan sebesar	Tersusunnya dara



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

	kependudukan		5,42% terhadap cakupan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	agregat kependudukan 30 buku. Tersusunnya penjilidan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (DAK) 72 buku.
	4. Sosialisasi Kebijakan Adminduk	65.898.200	Dukungan sebesar 17% terhadap cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Publikasi melalui media luar ruang 2 paket. Tersampainya informasi pelayanan Adminduk (DAK) 1 paket.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

	5. Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	39.741.800	Dukungan sebesar 7,01% terhadap Pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	Terlaksananya penerbitan MOU pemanfaatan data 5 dok. Terlaksananya penerbitan kajian pelayanan administrasi kependudukan 1 dok. Terlaksananya workshop pemanfaatan data kependudukan (DAK) 1 x.
	6. Pengembangan Aplikasi SIAK	46.375.300	Dukungan sebesar 6,97% terhadap cakupan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	Terlaksananya pengembangan aplikasi SIAK 2 aplikasi. Terlaksananya pemeliharaan aplikasi SIAK (DAK) 1 paket.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
